

---

## **Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah**

**Robby Syahputra Pardede<sup>1</sup>, Safriadi Pohan<sup>2</sup>, Yusi Tri Utari Panggabean<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STIE Al Washliyah Sibolga/Tapanuli Tengah

[robbyyahputrapardede2011@gmail.com](mailto:robbyyahputrapardede2011@gmail.com), [safriadip@gmail.com](mailto:safriadip@gmail.com), [yusitriutari@gmail.com](mailto:yusitriutari@gmail.com)

Koresponden : [robbyyahputrapardede2011@gmail.com](mailto:robbyyahputrapardede2011@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini dilakukan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. Sampel yang diambil adalah sampel jenuh. Metode analisis yang digunakan adalah metode Uji Asumsi Klasik dan Uji Analisis Data. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Yang menekankan analisisnya pada data-data numerika (angka) yang diolah dengan metode statistik dan data yang digunakan adalah data subjek dan data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner yang menggunakan skala likert. Data diolah secara statistik dengan program SPSS for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, karena memiliki nilai signifikansi, bahwa  $t$  hitung  $>$  dari  $t$  tabel atau  $10,602 > 2,08596$

**Kata Kunci:** Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

---

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka kebutuhan atas akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan pemerintah memberikan informasi atas aktifitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Bastian (2010), menyatakan bahwa organisasi sektor publik yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki kualitas informasi akuntansi yang kurang baik. Informasi yang kurang baik tersebut tidak dapat diandalkan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan setelah periode pelaporan. Kurang baiknya kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sedikitnya pemerintahan daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK.

Yang menjadi tolak ukur keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilihat dari opini setelah pengauditan oleh BPK yaitu opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Menurut BPKP tidak diperolehnya opini WTP disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut adalah adanya kelemahan sistem pengendalian intern, belum tercatatnya barang milik negara/ daerah, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dalam hal ini sangat diperlukannya suatu aplikasi yang berbasis komputer untuk membantu Pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan.

Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah

mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputersasi (*computerized*). Penyajian laporan keuangan dalam permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BPKP dalam hal ini deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah memberikan respon positif atas terbitnya permendagri ini, dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program aplikasi dimaksud adalah Program Aplikasi Komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah. Program Aplikasi ini telah diperkenalkan pada tanggal 29 Agustus 2006 oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Forum SAKD di Pusdiklatwas BPKP, Ciawi Bogor.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh BPKP ini merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya, daerah di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah saat ini telah dituntut untuk bisa menghasilkan LKPD yang memiliki nilai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Program Aplikasi Komputer Sistem Informasi Manajemen Daerah dimaksud untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik tingkat SKPD (sebagai entitas pelaporan) maupun ditingkat SKPD (entitas akuntansi). Dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini dapat memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah terkhusus pada laporan keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kalau sebelumnya sistem pelaporan keuangan masi secara manual atau tradisional, keakuratan datanya belum sepenuhnya akurat, lengkap dan tepat waktu bagi manajemen keuangan di setiap OPD. Oleh karena itu pada saat ini dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang merupakan sistem yang sudah terintegrasi secara keseluruhan yaitu mengenai data pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah?
- b. Apakah dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dapat membuat Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat tersusun dengan baik ?
- c. Apakah pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah menguasai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah?

### **Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang dibahas dalam penelitian ini, maka batasan masalah hanya membahas tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **“Apakah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah?”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Pustaka Sistem Informasi Manajemen Daerah Pengertian Sistem**

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut **Romney dan Steinbart (2014:3)**, Sistem (*system*) adalah “Serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar”.

Menurut **Sutanta (2011:91)**, Sistem adalah sekumpulan kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu, sehingga membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan.

Sedangkan menurut **Yusuf dan sudrajat (2014:40)**, Sistem adalah kumpulan dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah komponen yang saling berhubungan, bekerja secara harmonis, dan terstruktur untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

### **Pengertian Informasi**

Kata informasi dapat diartikan berita yang mengandung maksud tertentu. Manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang selalu ingin dibagikan pada orang lain. Pengalaman atau pengetahuan yang dikomunikasikan kepada orang lain tersebut merupakan pesan atau informasi. Jadi, pesan atau informasi menuntut adanya kehadiran pihak lain.

Menurut **Romney dan Steinbart (2014)**, Informasi (*information*) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana peranannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi.

### **Ciri- Ciri Informasi**

Menurut **Darmawan (2012:2)**, menyatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian oleh dua orang atau lebih yang berbeda-beda dan apabila hasil pengujian tersebut hasilnya sama, maka dianggap data tersebut akurat.
- b. Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
- c. Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
- d. Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap.

### **Manfaat Informasi**

Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut **Sutanta(2011:10)** adalah:

- a. Menambah Pengetahuan. Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- b. Mengurangi ketidak pastian pemakai Informasi akan mengurangi ketidak pastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.
- c. Mengurangi risiko kegagalan  
Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.
- d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.
- e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

### **Pengertian Manajemen**

Menurut **Hasibuan (2010:33)**, mengatakan bahwa “Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan”.

#### a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Daerah

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah pada pemerintah daerah diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mempunyai tujuan yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya.

Menurut **Djaja** dalam **Budiman (2013:26)**, Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan: Aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sedangkan Menurut **Yanto at al. (2019: 48)**, Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan: Sistem informasi manajemen pemerintah daerah yaitu subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang membantu kebutuhan informasi bagi pengelolaan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi secara baik. Sedangkan menurut Djaja mengatakan yaitu aplikasi SIMDA ialah database yang bermaksud untuk memudahkan pengaturan keuangan daerah di tempat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut **Agustin (2019:40)** Sistem Informasi Manajemen merupakan proses penyusunan informasi jadi sesuatu data yang bernilai jujur, bermakna, serta tepat waktu akan dipakai saat menentukan keputusan. Sistem informasi manajemen bisa juga diartikan sebuah cara yang menghasilkan data yang tepat waktu kepada manajemen.

#### Tujuan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Tujuan diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah menurut **Yanto (2019: 49)** yaitu:

- Sebagai tempat pertukaran informasi pada masing-masing bagian peraturan menerima kontak jaringan Sistem Informasi Manajemen Daerah.
- Untuk alat komunikasi kemudian melalui webcam untuk unit kerjaterima koneksi jaringan Sistem Informasi Manajemen Daerah.
- Sebagai alat pengaruh bagi perwujudan kegiatan, untuk pencapaian atau pemasukan dana.

#### Fungsi Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

Menurut **Yanto (2019: 49)** Fungsi utama pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Daerah yaitu:

- Membantu pemerintah daerah untuk melakukan penanganan keuangan daerah (anggaran, pelaksanaan, dan tanggung jawaban).
- Mengatur laporan keuangan secara efektif dan tepat.
- Mengarsipkan data keuangan bagi kepentingan yang lain.
- Menyediakan informasi yang tepat secara efektif dan efisien yang digunakan bagi pengguna laporan.
- Memudahkan proses audit bagi Auditor dengan mengubah aturanevaluasi manual menjadi *Electronic Data Processing* (EDP) evaluasi.

#### Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

Sistem Informasi Manajemen Daerah dapat diklasifikasi menjadi tiga tahapan (**BPKP,2008**) yaitu:

- Sistem Informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
- Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan/ lembaga/ sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah, dan

- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

### **Output Yang Dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah**

Output yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah menurut **BPKP (2008)** adalah:

- a. Penganggaran
- b. Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- d. Surat Penyediaan Dana (SPD)
- e. Penatausahaan
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- g. Surat Perintah Membayar (SPM)
- h. Surat Tanda Setoran (STS)
- i. Register
- j. Surat Pengendalian lainnya
- k. Akuntansi dan Pelaporan
- l. Jurnal
- m. Buku Besar
- n. Buku Pembantu
- o. Laporan Realisasi Anggaran
- p. Laporan Arus Kas
- q. Neraca

### **Indikator Sistem Informasi Manajemen Daerah**

Menurut **Azhar Susanto (2013 :207)** dalam bukunya terdapat 6 Indikator Sistem Informasi Manajemen Daerah yaitu:

- a. Perangkat Keras (*Hardware*)  
Merupakan peralatan phisik yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, memasukkan dan mengeluarkan data hasil pengolahan dalam bentuk informasi.
- b. Perangkat Lunak (*Software*)  
Merupakan sekumpulan program yang digunakan untuk mengoperasikan suatu aplikasi pada komputer.
- c. Brainware (*Manusia*)  
Merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, yang meliputi pengumpulan, pengolahan data, pendistribusian data sampai pemanfaatan data untuk kebutuhan organisasi.
- d. Prosedur (*Prosedure*)  
Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dengan cara yang sama. Proses penting untuk sebuah organisasi agar segala sesuatu bisa dilakukan secara konsisten.
- e. Database dan Sistem Manajemen Database  
Merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap saat dibutuhkan.
- f. Teknologi Jaringan Komunikasi (*Network*)  
Merupakan pemanfaatan media elektronik untuk memindahkan informasi maupun data dari satu lokasi ke lokasi lain maupun beberapa lokasi yang berbeda.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

#### **Defenisi Kualitas**

Defenisi kualitas menurut **Iman Mulyana (2010:96)** menyatakan bahwa kualitas adalah “Sebagai kesesuaian dengan standar, dikur berbasis ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Sedangkan **Atmaja (2018: 11)**, menyatakan bahwa kualitas adalah “Suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang menemui atau melebihi harapan. mendefenisikan kualitas sebagai kecocokan untuk pemaksaan”.

## Laporan Keuangan

Menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**, laporan keuangan merupakan “Laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”

Dalam **Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006**, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah “Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode”.

Menurut **Ariska (2019: 18)** Laporan keuangan adalah: Hasil akhir dari proses akuntansi yang sudah dicapai sepanjang satu periode (satu tahun). Laporan keuangan lah yang jadi data untuk para penggunanya untuk bahan proses pengambilan keputusan, pertanggung jawaban, serta menggambarkan penunjuk kesuksesan suatu pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya”.

Menurut **Masmudi (2003:77)** Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

## Tujuan Laporan Keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan berdasarkan **Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010** tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah: Digunakan sebagai akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara periodik, dan manajemen yaitu membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat”.

Sedangkan menurut **Halim (2009:20)** menyatakan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan laporan tentang:

### a. Posisi Keuangan

Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu (contohnya akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun). Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

### b. Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisari, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

### c. Arus Kas

Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu

### d. Kinerja Pelaporan Keuangan

Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

## Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Menurut **Diamond, (2002:39)** Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan hutang yang mereka kelola.
- b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah.

Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

- c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban
- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut **Fahmi (2015:5)** yang menyatakan bahwa manfaat laporan keuangan adalah: Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan mendatang”.

### **Karakteristik Laporan Keuangan**

Menurut **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** tentang standar Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karakteristik laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. **Relevan**  
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya.
2. **Andal**  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3. **Dapat dibandingkan**  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara Eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. **Dapat dipahami**  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan penggunaan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### **b. Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Indikator kualitas laporan keuangan menurut **Sande (2013:11)** diukur dengan 7 indikator yaitu:

- a. Laporan keuangan di susun dengan lengkap  
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan).
- b. Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu  
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu menyelesaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.
- c. Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur  
Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.

- d. Laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh. Apabila dilakukan pengujian terhadap laporan keuangan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- e. Laporan keuangan dijadikan sesuai tolak ukur untuk tahun berikutnya  
Laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- f. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bebas dari kesalahan material.
- g. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan memenuhi kebutuhan untuk para pengguna laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan periode sebelumnya.

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan pada informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya untuk kebutuhan persiapan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi dalam laporan keuangan **Ridzal (2020: 90)**.

Menurut **Bastian (2010: 35)** kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting yaitu untuk bahan pembandingan dan untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, adapun beberapa penelitian terdahulu oleh.

#### **1. Ridwan, (2009)**

Dengan Judul "**Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Keuangan) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintahan Daerah Indramayu)**". Adapun hasil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikansi dari Penerapan Aplikasi SIMDA Keuangan Tersebut.

#### **2. Nugraha, (2013)**

Dengan Judul "**Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)**". Adapun hasil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dapat membantu meningkatkan Kualitas laporan Keuangan, karena Aplikasi SIMDA merupakan media yang sempurna untuk pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

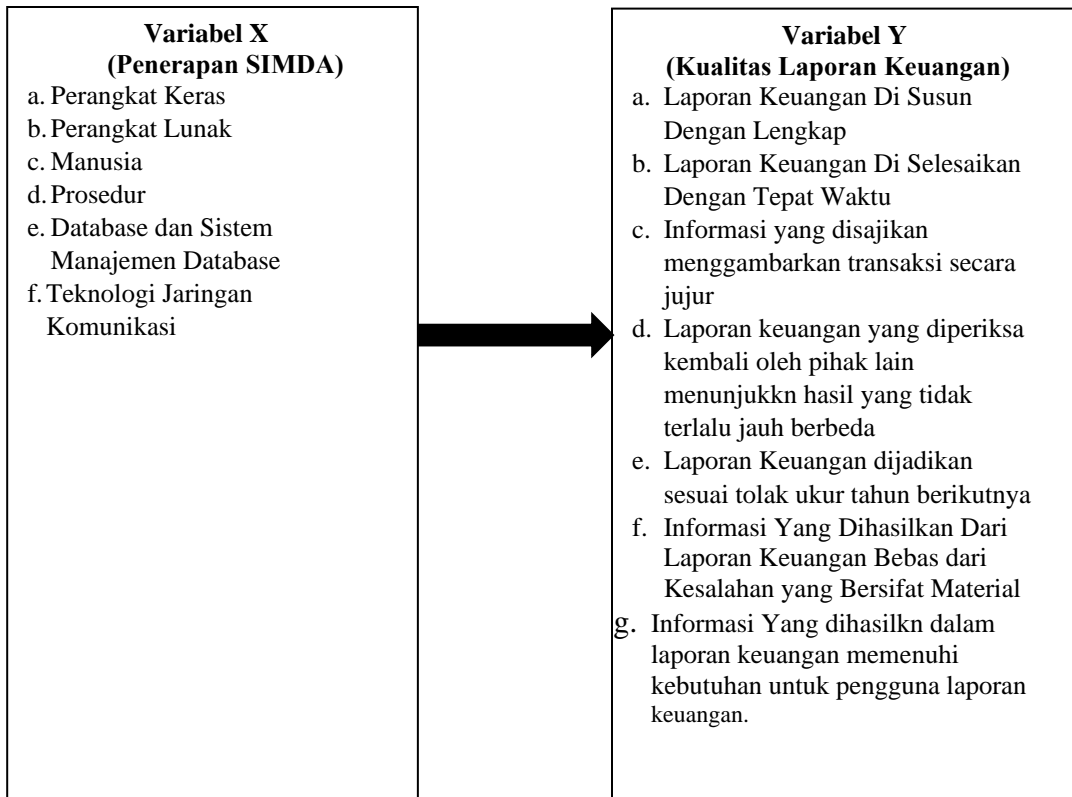
Sesuai dengan amanat PP. No 56 Tahun 2005 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pengolahan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, maka BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan) merancang SIMDA Keuangan untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Menurut PP. No 71 Tahun 2010 tentang SAP mengenai kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhinya. Ada beberapa indikator laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem akuntansi pemerintah yang baik yaitu meliputi keempat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Berdasarkan PP. No 56 Tahun dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan mengandung arti yaitu sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja suatu organisasi khususnya pemerintahan.

Kerangka pikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran pokok permasalahan penelitian secara jelas dan menyeluruh, adapun kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar -2.1.

**Gambar. 2.1. Kerangka Pikir**



Sumber : Azhar Susanto (2013:207) dan Sande (2013:11)

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Korelasioanal yang menjelaskan karakteristik berupa hubungan variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemn Daerah terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 22 orang Pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel – 3.1. Lay Out Kuesioner

No	Variabel	Indikator	No item	Keterangan
1	Variabel X Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah	a. Perangkat Keras b. Perangkat Lunak c. Manusia d. Prosedur e. Database dan Sistem Manajemen Database f. Teknologi Jaringan Komunikasi	1 - 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10	Skala likert
2	Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan	a. Laporan Keuangan Di Susun Dengan Lengkap b. Laporan Keuangan Di Selesaikan Dengan Tepat Waktu c. Informasi yang disajikan menggambarkan transaksi secara jujur d. Laporan keuangan yang diperiksa kembali oleh pihak lain menunjukk hasil yang tidak terlalu jauh berbeda	1 - 2 3 - 4 5 - 6	Skala likert

	e. Laporan Keuangan dijadikan sesuai tolak ukur tahun berikutnya	7	
	f. Informasi Yang Dihasilkan Dari Laporan Keuangan Bebas dari Kesalahan yang Bersifat Material		
	g. Informasi Yang dihasilkn dalam laporan keuangan memenuhi kebutuhan untuk pengguna laporan keuangan.	8	
		9	
		10	

Sumber: Azhar Susanto (2013 :207) dan Sande (2013:11)

Skala Likert digunakan “Untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social.”(Sugiyono,2012:132).

Skala Likert merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan skor. Cara pengukurannya yaitu dengan menghadapkan seseorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban.

- a. Sangat setuju (SS) dapat skor 5
  - b. Setuju (S) dapat skor 4
  - c. Kurang Setuju (KS) dapat skor 3
  - d. Tidak Setuju (TS) dapat skor 2
  - e. Sangat Tidak Setuju (STS) dapat skor 1
- a. Uji Instrumen

Kuesioner yang baik, harus diuji terlebih dahulu validitas dan realibilitasnya, sehingga penelitian yang diperoleh nantinya akan menjadi baik. Pengujian dilakukan dengan bantuan *software* pengolahan data *Statistical Package for Social Sciensces* (SPSS) versi 21.00.

1) Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner Uji Validitas dilakukan dengan memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklarifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Item-item pertanyaan dapat dikatakan valid jika memiliki *factor loading* lebih besar dari “0,30.” (Sugiyono,2012 : 178).

2) Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala, dengan gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dikatakan andal (*reliable*) jika memiliki nilai batasan *cronbach alpha* lebih dari “0,6.” (Sekaran yang disalin Priyotno Duwi, 2011 : 120)

### 3.6. Variabel dan Defenisi Operasional

#### 3.6.1 Variabel

Variabel yaitu konsep yang mempunyai macam-macam nilai yang menganalisa hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dimana jenis variabel penelitian ada 2 yaitu variabel bebas (*Independent*) dan variabel terikat (*dependent*).

a. Variabel Bebas

Variabel bebas atau variabel indenpenden (X) yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan pada variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat atau variabel dependent (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya perubahan dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

### 3.6.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Sugiyono, 2012:38). Defenisi operasional diperlukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang sudah diidentifikasi sebagai upaya pemahaman dalam penelitian.

a. Variabel Independen (Variabel Bebas) yaitu Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah proses implementasi seorang individu dari minat, kreativitas, keinginan untuk berkembang, kemampuan untuk bertanggung jawab dan kemandirian dari Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) yaitu Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang harus diwujudkan pada informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya untuk kebutuhan persiapan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menghasilkan informasi dalam laporan keuangan hasil kerja yang dihasilkan oleh kemampuan Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah.

## Teknik Analisis Data

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastitas.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen). Selain itu dapat juga digunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas diantara variabel independen dapat dilihat dari Tolerance dan nilai VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/Tolerance$ ). Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah model yang memiliki nilai tolerance  $\geq 0,1$  atau nilai  $VIF \leq 10$ . Sebaliknya, jika nilai Tolerance  $< 0,1$  atau nilai  $VIF > 10$ , maka ada multikolinearitas di antara variabel independen.

#### Uji Analisis Data

Terkait dengan penggunaan uji analisis data, terdapat beberapa analisis yang digunakan antara lain :

- a. Analisis Regresi Linear Berganda  
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk maksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari regresi linear sederhana dengan persamaan  $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$ , menurut **Sugiyono (2012 : 272)** sebagai berikut:
- b. Uji Determinasi  
Teknik ini digunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh variabel bebas atau independen (X) terhadap variabel terikat dependen (Y) dilakukan perhitungan koefisien determinasi dengan rumus yaitu:  $KD = r_{xy}^2 \times 100 \%$ .
- c. Uji *t* Statistik  
Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diadakan pengujian dengan menggunakan rumus *t* menurut **Sugiyono (2012: 93)** yaitu :

$$t = \frac{r \sqrt{n-1}}{\sqrt{n-r^2}}$$

Keterangan :

r = korelasi xy yang ditemukan

n = jumlah sampel

*t* = *t*<sub>hitung</sub> yang selanjutnya dibandingkan dengan *t*<sub>tabel</sub>

Apakah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dilakukan uji parsial atau uji *t* (Uji 2 arah) pada taraf signifikan ( $\alpha = 0,05$ ) menunjukkan tingkat probabilitas terjadinya kesalahan  $\alpha = 5 \%$  dengan membandingkan *t*<sub>hitung</sub> dengan *t*<sub>tabel</sub>, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1)  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  : artinya hipotesis alternatif (*H<sub>a</sub>*) diterima dan hipotesis nol (*H<sub>o</sub>*) ditolak.

2)  $t_{hitung} \leq t_{table}$  : artinya hipotesis alternatif (*H<sub>a</sub>*) ditolak dan hipotesis nol (*H<sub>o</sub>*) diterima.

- d. Uji F

Uji Fhitung dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel bebas mempunyai pengaruh positif signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.. Model hipotesis yang digunakan dalam uji Fhitung ini adalah:

*H<sub>0</sub>*:  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

*H<sub>1</sub>*: Minimal satu  $\beta_i \neq 0$ , artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan:

1) *H<sub>0</sub>* diterima jika *F*<sub>hitung</sub> ≤ *F*<sub>tabel</sub> pada  $\alpha = 5\%$

2) *H<sub>1</sub>* diterima jika *F*<sub>hitung</sub> > *F*<sub>tabel</sub> pada  $\alpha = 5$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Sejarah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah

Sejarah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terlepas dari sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Tapanuli Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara yang Ibu kotanya terletak di Sibolga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kota-kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk kota Praja Daerah Tingkat II. Dengan demikian Sibolga merupakan Kota Madya Sibolga dan juga sekaligus Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang penetapan batas

Wilayah Kota di seluruh Indonesia, telah

diatur bahwa Ibukota Kabupaten Dati II tidak boleh berada dalam Wilayah Kotamadya Dati II, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai memikirkan pemindahan Ibukota dari Kota Sibolga ke salah satu Ibukota Kecamatan di Kabupaten Dati II Tapanuli Tengah yang dapat mendukung menjadi Ibukota Kabupaten daerah Tingkat II Tapanuli Tengah.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan penilaian disepakati dan diusulkan Kota Pandan Menjadi Ibukota Kabupaten Dati II Tapanuli Tengah. Kantor Bupati KDH di Pandan selesai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan oleh Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 1992.

Pemindahan pusat Pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten Dati II Tapanuli Tengah diusulkan pada Pemerintahan Atasan melalui Surat Bupati KDH Tk.II Tapanuli Tengah Nomor 138/2649 tanggal 28 November 1992. Perihal usul pemindahan pusat Pemerintahan yang sebelumnya berkedudukan di dalam Wilayah Kotamadya Sibolga dipindahkan ke Kawasan Perkantoran Pandan.

Usul pemindahan pusat Pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang diprogramkan sejak tahun 1981 melalui proses yang cukup lama, dan perjuangan para Pejabat Pemerintah yang bertugas di Kabupaten Tapanuli Tengah, akhirnya Pemerintah Pusat menyetujui dan menetapkan Kota Pandan Sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1998, Tentang Pemerintah Ibukota Kabupaten Dati II dari Wilayah Kotamadya Dati II Sibolga pada tanggal 1 Agustus 1998 yang ditandai dengan penekanan tombol peresmian dan penandatanganan prasasti peresmian di Kota Pandan.

Demi mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut maka dibentuklah beberapa Badan Lembaga dan Instansi Teknis daerah diantaranya adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### Visi dan Misi

visi adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. adalah : *“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah yang Berwawasan Kebangsaan, Terampil, Mandiri, Sehat, Berprestasi dan Berdaya Saing yang Dilandasi Iman dan Takwa.”*

Untuk tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan hakikat yang terkandung dalam visi dimaksud sebagai berikut:

- 1) Pemuda adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang berumur 15 s.d 35 Tahun sesuai dengan kategori pemuda pada kerangka akademis Rancangan Undang-Undang Kepemudaan.
- 2) Masyarakat Olahraga adalah orang-orang yang terlibat kegiatan olahraga seperti Atlit, Pembina, Pelatih, Wasit/Juri, Guru olahraga, Tenaga olahraga dan Pengelola olahraga.
- 3) Wawasan kebangsaan adalah memiliki pengetahuan tentang seluk beluk sejarah masa lalu, masa sekarang dan progress masa depan bangsa Indonesia yang membentuk pemuda yang menghargai para pejuang, cinta tanah air serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara berkesinambungan.
- 4) Terampil adalah memiliki keahlian dan kemampuan aplikatif sesuai dengan profesi yang ditekuni dan dimiliki.
- 5) Mandiri adalah mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan dengan orang lain, yaitu pemuda berjiwa wirausaha yang dapat menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja.
- 6) Sehat adalah terbebas dari berbagai penyakit dan pengaruh negatif yang dapat mengganggu aktivitas.
- 7) Berprestasi adalah mempunyai keunggulan, kelebihan dari yang lain.
- 8) Berdaya saing adalah mampu berkompetisi/bersaing dengan sesame baik dalam tingkat lokal, Nasional maupun Internasional
- 9) Iman dan takwa adalah landasan agama yang tertanam pada hari setiap manusia dan berada dalam ketaatan ajaran agama yang diyakini.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita/keinginan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah diperlukan suatu perencanaan Program/Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah:

- 1) Mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda dalam menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang terampil dan berdaya saing.
- 2) Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan.
- 3) Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian.
- 4) Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim yang kondusif.

#### Pembahasan

##### Analisis Deskriptif Responden

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, adapun analisis data responden yang penulis ambil sebanyak 22 orang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan pegawai, tingkat usia, dapat dilihat pada tabel 4.2, 4.3, dan 4.4.

**Tabel – 4.2. Data Responden Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	12	54,55%
2	Perempuan	10	45,45%
		<b>22</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022**

Dari data tabel -4.2 di atas, dapat dilihat pegawai laki-laki yaitu 54,55% berbanding 45,45 % dengan pegawai perempuan.

**Tabel – 4.3. Data Responden Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Strata Dua (S2)	1 orang	4,55 %
2	Strata Satu (S1)	11 orang	50,00 %
4	SMK/SMA	10 orang	45,45 %
5	SMP	0 orang	0 %
6	SD	0 orang	0 %
		<b>22 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022**

Dari tabel di -4.3 tersebut, dapat dilihat pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 sebanyak 1 orang (4,55 %), dengan tingkat pendidikan S-1 sebanyak 11 orang (50,00 %), dan dengan tingkat pendidikan SMK/SMA 10 orang (45,45 %).

**Tabel – 4.4. Data Responden Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 25	2 orang	9,09 %
2	26 - 39	8 orang	36,36 %
3	> 40	12 orang	54,55 %
	<b>Jumlah</b>	<b>22 orang</b>	<b>100 %</b>

**Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022**

Dari data tabel – 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa pegawai dengan tingkat usia di bawah 25 tahun sebanyak 2 orang (9,09%) tingkat usia 26 s/d 39 tahun sebanyak 8 orang (36,36%) dan diatas 40 tahun sebanyak 12 orang (54,55%).

### **Hasil Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses kegiatan mendiskriptifkan temuan yang diperoleh dari jawaban responden yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang dianalisis tentang pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah. Data yang dianalisis merupakan data yang dikembangkan dari wawancara dan kuesioner, untuk hal-hal yang tertentu yang tidak jelas dilakukan melalui observasi. Penulis melaksanakan penelitian pada Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui metode :

#### **1) Analisis data melalui observasi/ pengamatan**

Untuk melihat secara langsung situasi serta keadaan yang sebenarnya sebagai data perbandingan dengan keterangan yang diperoleh dari penelitian ini.

#### **2) Analisis data melalui wawancara**

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab dengan pihak yang dapat memberikan informasi. Dalam hal ini, terlebih dahulu dipersiapkan apa yang ditanyakan kepada responden.

#### **3) Analisis data melalui kuesioner**

Kuesioner dilaksanakan guna melihat secara langsung hubungan dan pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui hubungan koefisien korelasi dan koefisien determinasi antara variabel X (Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah) dengan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan).

## Uji Instrumen (uji kuesioner)

### Uji Validitas

Uji Validasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi pearson product moment ( $r$ ) dengan cara mengkolerasikan antara skor totalnya atau melihat  $r$  hitungnya pada *program SPSS 21 for Windows*. Berikut hasil pengujiannya:

**Tabel – 4.5. Hasil Uji Validitas Variabel X (Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah)**

No item	r hitung	r kritis	Keterangan
Item 1	0,866	0,30	Valid
Item 2	0,750	0,30	Valid
Item 3	0,751	0,30	Valid
item 4	0,659	0,30	Valid
item 5	0,871	0,30	Valid
Item 6	0,751	0,30	Valid
Item 7	0,855	0,30	Valid
Item 8	0,751	0,30	Valid
Item 9	0,871	0,30	Valid
Item 10	0,609	0,30	Valid

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat setiap item pernyataan (Item 1- Item 10),  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  kritis yaitu 0,30. Dengan demikian keseluruhan item pernyataan variabel di atas dinyatakan valid dan memenuhi syarat sebagai alat ukur variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah.

**Tabel – 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)**

No item	r hitung	r kritis	Keterangan
Item 1	0,551	0,30	Valid
Item 2	0,821	0,30	Valid
Item 3	0,608	0,30	Valid
item 4	0,546	0,30	Valid
item 5	0,626	0,30	Valid
Item 6	0,586	0,30	Valid
Item 7	0,751	0,30	Valid
Item 8	0,612	0,30	Valid
Item 9	0,658	0,30	Valid
Item 10	0,539	0,30	Valid

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat setiap item pernyataan (Item 1- Item 10),  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  kritis yaitu 0,30. Dengan demikian keseluruhan item pernyataan variabel di atas dinyatakan valid dan memenuhi syarat sebagai alat ukur variabel Kualitas Laporan Keuangan.

### Uji Reliabilitas

Setelah mengetahui seluruh item pernyataan valid, maka akan dapat diuji reliabilitas dari kuesioner tersebut. Jawaban responden terhadap pernyataan dikatakan reliabilitas jika masing-masing pernyataan dijawab dengan konsisten.

Adapun hasil uji reliabilitas pada Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel – 4.7**  
**Uji Reliabilitas Variabel Aktualisasi Diri, Kompetensi dan Prestasi Kerja**

No	Item	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
1	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X)	0,918	10	Reliable
2	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,828	10	Reliable

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Berdasarkan hasil reliabilitas pada Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan seluruhnya menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0,6. Hasil ini berarti alat ukur yang digunakan memenuhi syarat yang diandalkan (reliable).

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah suatu model layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, uji *Kolmogorov-Sminorv*, analisis grafik histogram dan analisis grafik P-P slot. Adapun hasil pengukuran dengan ketiga pendekatan ini dijelaskan sebagai berikut:

#### Uji *Kolmogorov-Sminorv*,

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data normal. Jika nilai yang didapat  $>0,05$  maka dapat dikatakan bahwa distribusi data normal. Apabila nilai signifikan  $<0,05$  maka distribusi data tidak normal.

**Tabel – 4.8. Uji Normalitas *Kolmogorov-Sminorv***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.43794449
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.067
	Negative	-.098
Kolmogorov-Smirnov Z		.459
Asymp. Sig. (2-tailed)		.984
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

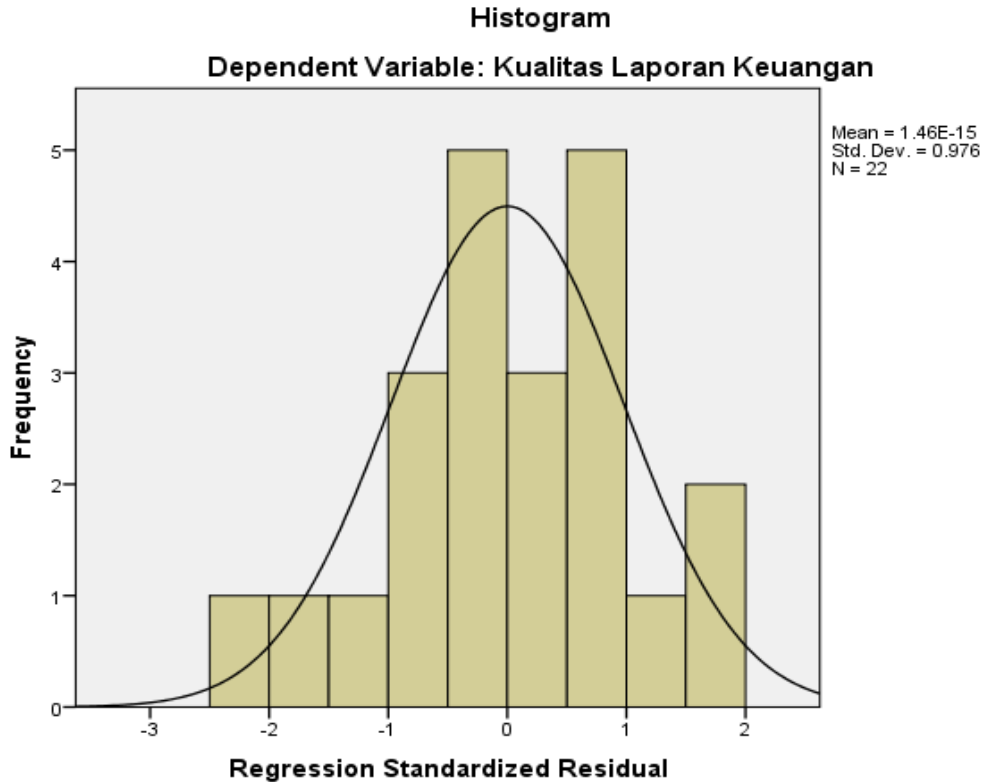
**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Berdasarkan Tabel 4.8 nilai yang diperoleh dari hasil uji normalitas *Kolmogorov-Sminorv* sebesar 0,984. Nilai ini lebih besar dari pada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai residual terstandarisasi, berdistribusi normal dan memenuhi asumsi uji normalitas.

### Grafik Histogram

Analisis grafik histogram juga digunakan untuk melihat apakah distribusi data normal. Distribusi data normal jika grafik histogram berbentuk lonceng, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar – 4.2. Uji Normalitas Histogram



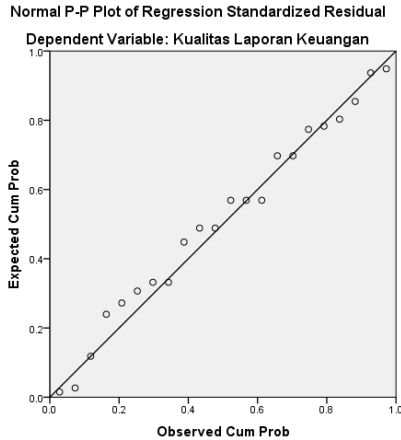
Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022

Berdasarkan gambar 4.2 Dapat dilihat grafik histogram ini membentuk sebuah lonceng. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal dan sesuai dengan asumsi uji normalitas.

### Grafik P-P Plot

Selain dengan menggunakan grafik histogram, uji normalitas juga dapat diketahui dengan menggunakan grafik P-P plot. Distribusi data normal jika titik-titik pada grafik tersebar dan mengikuti arah garis diagonal.

Gambar – 4.3. Uji Normalitas Grafik P-P Plot



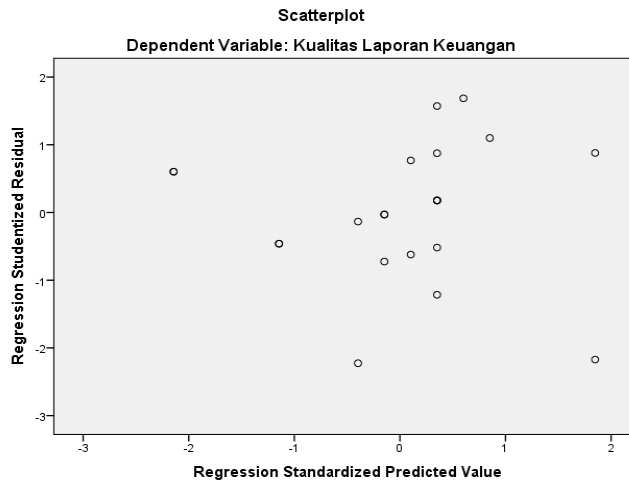
Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal dan sesuai dengan asumsi uji normalitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat apakah titik-titik yang ada pada grafik *Scatterplot* tersebut diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada data. Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut:

**Gambar- 4.4. Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022

Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik *Scatterplot* menyebar secara acak baik dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk suatu pola yang jelas. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**Uji Multikonearitas**

Pengukuran uji multikonearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF pada model regresi. Deteksi tidak adanya multikonearitas apabila nilai VIF yang didapat lebih kecil dari pada 10, dan memiliki *tolerance* mendekati 1. Hasil uji multikonearitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9, sebagai berikut:

**Tabel – 4.9. Uji Multikonearitas**

Coefficients <sup>a</sup>	
---------------------------	--

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.722	3.112		1.517	.145		
	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah	.851	.080	.921	10.602	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel lebih dari 0,1. Nilai *tolerance* untuk Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X) memiliki besar 0,1000, dan nilai ini sesuai dengan syarat uji multikonearitas yaitu >0,1. Nilai VIF untuk Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X) sebesar 1,000 dan nilai ini <10. Dari hasil *tolerance* dan VIF variabel ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikonearitas pada variabel tersebut.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X) terhadap variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan (Y). Hasil analisis ini diukur menggunakan *software*, dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :

**Tabel – 4.10**

#### Regresi Linear Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.722	3.112		1.517	.145
	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah	.851	.080	.921	10.602	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilihat dalam kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,722 + 0,851 X$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) positif sebesar 4,722. Ini menunjukkan tingkat konstanta dimana jika variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah nol (0), maka Kualitas Laporan Keuangan akan tetap 4,722 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien X (b1) sebesar 0,851. Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan koefisien regresi sebesar 0,851.dengan asumsi variabel lain tetap.

### Uji Determinasi

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel – 4.11. Uji Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.921 <sup>a</sup>	.849	.841	1.47345
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan				

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Dari perhitungan di atas dapat diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,849 hal ini berarti bahwa yang terjadi pada variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) 84,9 % ditentukan oleh variabel bebas (Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan sisanya sebesar 15,1 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas didalam penelitian ini.

**Uji t (Statistik)**

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dilakukan uji t, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel – 4.12. Uji t (Statistik)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.722	3.112		1.517	.145
	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah	.851	.080	.921	10.602	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Untuk mengetahui nilai t hitung dengan tujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

- a). Membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan ketentuan
  - (1) Apabila t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai signifikan dibawah nilai  $\alpha$  5 % maka hipotesis alternative (Ha) diterima dan hipotesis O (Ho) ditolak.
  - (2) Apabila nilai t hitung lebih kecil dari dari t tabel nilai signifikan diatas nilai  $\alpha$  5 % maka hipotesis alternative (Ha) ditolak dan hipotesis (Ho) diterima.
- b) Mencari nilai derajat kebebasan (dk), yaitu  $dk = n-2$ , dalam hal ini  $n = 22$ , maka  $dk = 22-2 = 20$
- c) Setelah nilai dk diketahui maka nilai t tabel (nilai telah diketahui bahwa tabel t) untuk dk 20 pada taraf signifikan 0,05 adalah sebesar 2,08596.

Selanjutnya nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel .

Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh hasil bahwa t hitung > dari t tabel atau  $10,602 > 2,08596$ . Karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka artinya jika variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah ditingkatkan maka variabel terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dengan tingkat yang signifikan.

**Uji F**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama- sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah, sedangkan varaibel terikat merupakan Kualitas Laporan Keuangan. Pengujian data menggunakan model sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan  $F_{tabel} < 0,05$  maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai signifikan  $F_{tabel} > 0,05$  maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dalam menentukan nilai  $F_{tabel}$  dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

- (1)  $df$  (Pembilang) =  $k - 1$
- (2)  $df$  (Penyebut) =  $n - 1$

Keterangan:

$n$  = jumlah sampel penelitian

$k$  = jumlah variabel bebas dan terikat

Pada penelitian ini diketahui sampel ( $n$ ) adalah 22 dan jumlah keseluruhan variabel ( $k$ ) adalah 2, sehingga diperoleh:

- (1)  $df$  (Pembilang) =  $k - 1$   $df$  (Pembilang) =  $2 - 1 = 1$
- (2)  $df$  (Penyebut) =  $n - 1$   $df$  (Penyebut) =  $22 - 1 = 20$

Nilai  $F_{hitung}$  akan diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS, kemudian akan dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  pada tingkat  $\alpha = 5\%$

**Tabel – 4.13. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	244.033	1	244.033	112.402	.000 <sup>b</sup>
	Residual	43.421	20	2.171		
	Total	287.455	21			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah						

**Sumber : Hasil pengolahan data program SPSS 21,00 for windows, 2022**

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 112,402. Jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  maka  $F_{hitung}$  112,402. >  $F_{tabel}$  3,49 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas yakni Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah,

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian instrument (uji kuesioner) yang dilakukan menunjukkan nilai corrected item total correlation di atas nilai r kritis 0,30, yang berarti semua butir pertanyaan ketiga variabel tersebut dinyatakan valid sehingga memenuhi syarat sebagai alat ukur variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan variabel Kualitas Laporan Keuangan.
2. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* yang diperoleh diatas 0,06 yaitu sebesar 0,918 untuk variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan 0,828 untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan sehingga semua alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabilitas sangat baik dan memenuhi syarat yang dihandalkan.
3. Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X) memiliki berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh hasil bahwa  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$  atau  $10,602 > 2,08596$ . Karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  maka artinya jika variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah ditingkatkan maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dengan tingkat yang signifikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Hamdi. (Ed). 2019. *Sistem Informasi Manajemen dalam Perspektif Islam*. PT RajaGrafindo Persada: Depok.
- Ariska, C. Masnidi, R., & Rachman, R. 2019. *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Akuntansi
- Atmaja, E. 2018. *Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2018 [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)*
- B. Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta. Salemba Empat
- Budiman, F., Arza, F.I. 2013. *Pendekatan Teknologi Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah*. Universitas Negeri Padang
- Darmawan, Deni. 2012. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Rosda
- Diamond Jack. 2002. *Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Requierid? IMF Working Paper. Fiscal Affairs Departement*.
- Dian Mitami. 2013. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemkab Pangkeb*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Duwi, Priyotno. 2011. *Belajar Cepat Olah Data Statistic dengan SPSS*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Fahmi, Irham. 2015. *Pengantar Manajemen Keuangan, Teori dan Soal Jawab*. Bandung: CV. Alfabeta
- Ferdinand, Agusty. 2014. *Metodologi Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertai Ilmu Manajemen*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, Abdul dan Mamduh M. Hanafi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasibuan, Malayu SP. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marshall B. Romney dan paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Prentice Hall.
- Mulyana Iman. 2010. *Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba
- Nugraha Hamdani Adi, Astuti Yuli Widya. 2013. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)*”. Jurnal Akuntansi Aktual. Malang. Universitas Negeri Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.**
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tentang Pelaporan Keuangan.**
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia.**
- Riduwan. 2009. *Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupate, Indra Mayu*. Bandung :Fakultas Universitas Padjajaran
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Teknis*. Bandung : Alfabeta.
- Sande, Peggy.2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Padang : Universitas Negeri Padang.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi. 2012. *Metode Penelitian survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- STIE Al-Washliyah Sibolga/Tapanuli Tengah, 2021. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian Penyusunan Skirpsi*, Sibolga.
- Sutanta,E. 2011. *Basis Data Dalam Tinjauan Konseptual*. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, Azhar. 2013. *Teori Belajar Pembelajaran*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Keenam, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yanto, E., dan Akfir. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)*. Indonesian Journal Of Strategic Management.
- Yusuf, M dan Sudrajat, J. 2014. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Pendapatan Pada Perum Damri Bandung*. Bandung: Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship